

TOPIK KITA

# **Ketergantungan Sistem Moneter Negara-Negara Muslim dan Upaya Mengatasinya**



Oleh: Ahmad Juanda



## Pendahuluan

Kondisi perekonomian terutama masalah moneter negara-negara muslim, yang sebagian besar dikategorikan sebagai negara sedang berkembang, masih banyak tergantung pada dominasi sistem moneter global. Istilah negara muslim sengaja digunakan untuk membedakan dengan istilah negara Islam. Dalam perspektif ekonomi, Chapra (2001) cenderung menggunakan istilah negara muslim, karena bertumpu pada pembangunan masyarakat bukan pada negara. Jadi yang dimaksud dengan negara-negara muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Keprihatinan dunia Islam terhadap dominasi sistem moneter global tersebut memicu kebangkitan untuk memikirkan pengembangan sistem moneter islami. Permasalahannya adalah darimana negara-negara muslim tersebut akan memulai dalam mengembangkan sistem ekonomi dan keuangannya secara islami sehingga dapat keluar dari dominasi sistem moneter global. Wacana yang sedang marak dibicarakan nampaknya sedikit membuahkan hasil, seperti misalnya munculnya beberapa lembaga keuangan dan perbankan Syari'ah. Walaupun hal itu masih jauh dari harapan idealnya.

Tulisan ini membahas gambaran kinerja ekonomi negara-negara muslim yang sebagian besar dari mereka merupakan negara yang mengalami dampak sistem moneter global, dan mau tidak mau menanggung beban berat dalam mengembangkan ekonominya. Beban tersebut dalam bentuk hutang luar negeri, terutama bagi negara-negara muslim yang tergolong sebagai penghutang besar. Selanjutnya, tulisan ini mencoba mengemukakan upaya-upaya yang dilakukan negara-negara tersebut untuk keluar dari jeratan sistem ekonomi moneter global yang bukan hanya sekedar wacana, tetapi juga langkah-langkah konkritnya.

## Dominasi Sistem Ekonomi Moneter Global

Dalam pandangan makro ekonomi internasional, lagi-lagi negara yang semakin terpuruk dalam menghadapi ekonomi global adalah negara-negara

sedang berkembang (NSB). Perekonomian nasional di masing-masing NSB, mau tak mau semakin sensitif terhadap gejolak perekonomian dunia. Salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh NSB adalah fluktuasi sistem moneter. Seperti misalnya masalah hutang, inflasi, valuta asing, neraca pembayaran dan pelarian modal. Fluktuasi tersebut sangat bergantung dari dinamika sistem moneter internasional yang sudah barang tentu dimotori oleh negara-negara maju.

Timbulnya permasalahan moneter tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Secara historis, akar permasalahannya tidak terlepas dari perkembangan di awal dekade 1970-an. Krisis yang terjadi di sebagian besar NSB saat ini merupakan klimak dari apa yang terjadi pada dekade 1970-an. Melonjaknya harga minyak pada 1973 telah mengalirkan arus petrodolar ke pusat-pusat keuangan internasional. Akibatnya, dana kredit melimpah, sehingga mengakibatkan NSB memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal internasional. Apalagi mengingat tingkat bunga riil kala itu sedemikian rendah, bahkan sempat negatif yakni lebih kecil dari suku bunga deposito (Basri, 1995).

Pinjaman komersial menjadi alternatif utama disebabkan pula karena tahun 1970-an merupakan era penolakan yang kuat terhadap praktik perusahaan transnasional dan multinasional di kebanyakan negara dunia ketiga. Fenomena ini dialami pula oleh Indonesia dengan gerakan nasionalisasi berbagai perusahaan asing yang ada. Akibatnya, peranan penanaman modal asing langsung (*direct foreign investment*) terhadap arus financial netto ke NSB merosot dari 25% tahun 1960 menjadi masing-masing 20% pada tahun 1970 dan semakin menurun pada 1980-an sebesar 10%.

Langkah baru dari sistem perekonomian moneter internasional terutama bagi NSB dengan mengedepankan kredit dari bank-bank internasional ini sangat dirasakan akibatnya sampai saat ini. Ketika resesi ekonomi berkecamuk pada 1980-an yang ditandai dengan merosotnya harga minyak

dan volume kredit mulai menciut, negara-negara debitor dihadapkan pada melonjaknya tingkat suku bunga riil, bahkan tertinggi sejak Depresi 1929-1932. Pada saat yang bersamaan, praktek proteksionisme berkecamuk. Akibatnya beban hutang NSB semakin melonjak. Meksiko, negara pertama yang memproklamkan diri sebagai negara yang tidak mampu dan tidak akan membayar hutang luar negerinya. Tetapi langkah ini tidak banyak diikuti oleh NSB lainnya, karena takut tidak akan memperoleh hutang pada periode masa mendatang. Mereka lebih memilih untuk mengcangkam ikat pinggang dan tetap memenuhi kewajiban hutangnya. Pada dekade akhir 1990-an dan awal 2000-an, lagi-lagi krisis moneter dialami oleh beberapa NSB. Mulai dari kawasan Asia pasifik, yang dipicu oleh krisis mata uang Bath-Thailand sampai pada krisis yang terjadi di Argentina dan Turki. Hal ini menunjukkan betapa semakin tergantungnya pembangunan ekonomi NSB terhadap negara maju.

#### Kinerja Ekonomi Negara-Negara Muslim

Negara-negara muslim merupakan salah satu bagian yang cukup besar dari dunia ini, baik dari sisi geografis, kelompok politik-ideologi, maupun potensi ekonomi. Jumlah negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) saat ini sebanyak 53 negara yang lokasinya tersebar sejak dari Afrika Utara-Barat hingga Asia Tenggara. Pada saat ini, jumlah keseluruhan penduduknya mencapai tak kurang dari 1,2 milyar jiwa, merupakan seperlima dari total populasi dunia. Jumlah penduduk yang besar ini tidak saja merupakan kekayaan *human capital* yang potensial, tetapi juga merupakan pasar ekonomi yang menjanjikan *economic gain* besar. Negara-negara muslim juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Lebih dari tiga seperempat cadangan minyak dunia dimiliki negara-negara ini, sementara sumber daya alam lain seperti gas, mineral, hutan, dan berbagai potensi kelautan sangat melimpah.

Meskipun demikian, kondisi negara-negara

muslim secara individual sangat bervariasi. Luas negara bervariasi dari sekitar 10 ribu km<sup>2</sup> (Comoros, Brunei, Gambia, Lebanon) hingga di atas 2 juta km<sup>2</sup> (Algeria, Kazakhstan, Sudan, Saudi Arabia). Demikian pula dengan jumlah penduduknya, ada beberapa negara yang hanya memiliki di bawah 5 juta jiwa (misalnya: Albania, Brunei, Comoros, Djibouty, Gabon, Libya, Mauritania, Suriname), tetapi beberapa yang lain di atas 100 juta jiwa dengan sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi –terutama minyak bumi dan gas seperti negara-negara di jazirah Arab dan Lautan Kaspia. Negara-negara muslim di Asia (Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh) memiliki kekayaan yang lebih bervariasi, namun di Afrika beberapa negara tidak memiliki yang beragam, ditunjang dengan heterogenitas politik, budaya dan sejarah yang melingkupi masing-masing maka kondisi dan kinerja ekonomi antar negara juga sangat bervariasi.

Dilihat dari indikator-indikator ekonomi 'konvensional' (lihat tabel 2) maka dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan ekonomi negara-negara muslim secara individual memang variatif. Bahkan adanya kesenjangan ekonomi yang lebar (*great economic disparity*) merupakan salah satu karakter yang menonjol. Dari kelima puluh tiga negara muslim, beberapa negara memiliki pendapatan perkapita (*BNP percapita*) yang tinggi sehingga termasuk *high income countries* (Unit Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei), sementara sebagian kecil lainnya termasuk dalam *middle income countries* (Arab Saudi, Malaysia, Turkey, Algeria, Libanon, Gabon, dan lain-lain). Tetapi, sesungguhnya masih lebih banyak negara yang tergolong dalam *low income countries*, termasuk Indonesia. Beberapa negara, bahkan hanya memiliki pendapatan perkapita di bawah 200 US dollar/tahun, seperti Afghanistan, Guinea Biessau, dan Sierra Leone. Kenyataan tentang tingginya disparitas pendapatan perkapita tersebut juga dapat disimpulkan dengan mencermati data *GNP capita PPP (purchasing power parity)*.

Pertumbuhan *GNP percapita* negara-negara

**Tabel 1: Beberapa Indikator Dasar Perekonomian Negara-Negara Muslim**

Negara	Luas Area (000 km <sup>2</sup> ) 1997	Jml.Pddk (juta) 1998	GNP/kapita (dollar AS) 1998	Pertumbuh. Riil GNP/kap.(%)	Nilai Tukar (per \$ AS) 1999
1. Afghanistan	652	25,1	--	--	3.000,00
2. Albania	27	3,3	810	6,8	135,12
3. Algeria	2.382	29,9	1.550	3,6	69,31
4. Azerbaijan	87	7,9	480	8,9	4.378,00
5. Bahrain	0,7	0,6	7.640	-1,5	0,38
6. Bangladesh	130	125,6	350	4,2	51,00
7. Benin	111	5,9	380	1,9	652,95
8. Brunei	5	0,3	--	-1,8	1,67
9. Burkina Fase	274	10,7	240	3,8	652,95
10. Cameron	485	14,3	610	3,8	652,95
11. Chad	1.259	7,3	230	5,5	652,95
12. Comoros	2	0,5	370	-2,5	489,72
13. Djibouty	23	0,6	--	--	177,72
14. Eguyp (Mesir)	995	61,4	1.290	4,5	3,41
15. Gabon	258	1,2	4.170	3,2	652,95
16. Gambia	10	1,2	340	2,0	11,5
17. Guinea	246	7,1	530	1,5	1.736,00
18. Guinea Bissau	28	1,2	160	-30,4	652,95
19. <b>Indonesia</b>	<b>1.812</b>	<b>203,7</b>	<b>640</b>	<b>-18,0</b>	<b>7.085,00</b>
20. Iran	1.622	61,9	1.650	-0,2	1.752,29
21. Iraq	437	22,3	--	--	0,31
22. Jordan	89	4,6	1.150	0,5	0,71
23. Khazakhstan	2.671	15,6	1.340	-1,2	138,20
24. Kuwait	18	1,9	--	--	0,30
25. Kyrgyzstan Rep.	192	4,7	380	2,8	45,43
26. Lebanon	10	4,2	3.560	1,4	1.507,50
27. Libya	1.760	5,3	--	--	0,46
28. Malaysia	329	22,2	3.670	-8,0	3,80
29. Maldives	0,3	0,3	1.130	4,4	11,77
30. Mali	1.220	10,6	250	1,3	652,95
31. Mauritania	1.025	2,5	410	4,5	225,00
32. Maroco	446	27,8	1.240	5,3	10,09
33. Mozambique	784	16,9	210	9,7	13.300,00
34. Niger	4.267	10,1	200	4,8	652,95
35. Oman	212	2,3	--	--	0,38
36. Pakistan	771	131,6	470	0,5	51,78
37. Palestina		2,7	1.560	3,0	--
38. Qatar	11	0,7	--	--	3,64
39. Saudi Arabia	2.150	20,7	6.910	-1,0	3,75
40. Senegal	193	9,0	520	3,8	652,95
41. Sierra Leona	72	4,9	140	-2,9	2.276,05
42. Somalia	627	9,1	--	--	--
43. Sudah	2.367	28,3	290	2,7	257,70
44. Suriname	156	0,4	1.660	2,5	987,50
45. Syria	184	15,3	1.020	-2,3	11,23
46. Tajikistan	141	6,1	370	13,3	--
47. Togo	54	4,5	330	-3,5	652,95
48. Tunisia	155	9,3	2.060	4,1	1,25
49. Turkey	770	63,5	3.160	2,3	641.400,00
50. Turkmenistan	470	4,7	--	--	5.200,00
51. Uganda	200	20,9	310	2,8	1.506,04
52. U.A. Emirates	84	2,7	17.870	-10,6	3,67
53. Yemen Rep.	528	16,6	280	4,3	--

Sumber: Islamic Development Bank, 2001

muslim juga sangat fluktuatif, dimana hal ini mencerminkan adanya instabilitas dan fondasi ekonomi yang tidak kokoh. Beberapa negara Asia Selatan yang semula banyak dibanggakan kinerja ekonomi karena selalu mengalami pertumbuhan positif, seperti Indonesia dan Malaysia, semenjak pertengahan tahun 1997 dilanda krisis ekonomi dahsyat. Pertumbuhan *real GNP percapita* kedua negara ini berturut-turut menjadi -18,0 dan -8,0, padahal sebelumnya mencapai rata-rata di atas 5% pada tahun 1990-an. Pertumbuhan negatif ini juga dialami oleh Bahrain, Brunei, Comoros, Buinea Bissau, Saudi Arabia, Sierra Leone, Togo dan Uni Emirat Arab. Bahkan, negara-negara kaya di jazirah Arab telah memiliki pertumbuhan yang rendah atau negatif pada periode 1985 hingga 1995 (Naqvy, 1999).

Banyak negara muslim yang menanggung beban hutang luar negeri yang besar, sementara yang lain dapat digolongkan sebagai negara kreditur. Beberapa negara di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (termasuk Iraq dan Iran yang tidak tercantum dalam data) tidak memiliki utang luar negeri, sementara yang dapat diklasifikasikan sebagai *pengutang kecil atau menengah* misalnya Chad, Sierra Lone, Kamerun, Jordan, Tunisia, Libanon. Beberapa negara yang termasuk *pengutang besar* misalnya Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Republik Arabia Siria.

Selain secara nominal cukup

Tabel 2: Indikator Utang Luar Negeri Negara-Negara Muslim (1980-1995)

Negara	Total Extern. Debt (million \$)		External Debt as Percentage of			
	1980	1995	GNP		Total Export	
	1980	1995	1980	1995	1980	1995
Chad	285	908	39.5	81.4	399.6	333.9
Sierra Leone	435	1.226	38.3	159.7	157.7	1163.5
Niger	863	1.633	34.5	91.2	132.8	571.7
Burkina Faso	330	1.267	19.5	55.0	88.0	346.1
Bangladesh	4.230	16.370	32.6	56.3	360.4	298.2
Uganda	689	3.564	54.6	63.7	208.1	555.1
Guinea Bissau	145	8.947	137.8	353.7	--	1874.3
Mali	732	3.066	45.4	131.9	227.3	457.1
Yaman Rep.	1.684	6.202	--	155.2	--	192.1
Gambia	137	426	61.5	--	206.6	235.1
Benin	424	1.646	30.2	81.8	133.1	285.6
Pakistan	9.930	30.152	42.4	49.5	208.7	257.9
Mauritania	843	2.467	125.5	243.3	306.1	458.5
Guinea	1.134	3.242	--	91.2	--	453.4
Senegal	1.473	3.845	50.5	82.3	162.7	274.3
Cameron	2.588	9.350	37.9	124.4	140.7	338.3
Mesir	19.131	34.116	89.2	73.3	207.7	208.1
Indonesia	<b>20.938</b>	<b>107.831</b>	<b>28.0</b>	<b>56.9</b>	--	<b>202.9</b>
Maroco	9.247	22.147	50.7	71.0	213.9	200.9
Syria	3.552	21.318	27.2	134.8	106.3	336.8
Jordan	1.971	7.944	--	126.2	129.9	1463.8
Tunisia	3.527	9.938	41.6	57.3	96.0	113.2
Lebanon	510	2.966	--	25.5	--	152.7
Turkey	19.131	73.596	27.4	44.1	333.1	177.8
Gabon	1.514	4.492	39.2	121.6	62.2	160.3
Malaysia	6.611	34.352	28.0	42.6	44.6	40.8
Oman	599	3.107	11.2	29.5	15.4	48.2
Saudi Arabia						
Kuwait						
UA Emirate						

Sumber: World Bank (1997)

besar, dari sisi perkembangan juga amat pesat. Secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 1980 hingga 1987 utang luar negeri telah meningkat hingga 47%. Peningkatan volume utang luar negeri yang sama rata-rata seluruh nsb hanya meningkat 43%. Peningkatan volume utang luar negeri ini tentu saja meningkatkan beban pembayaran kembali, bahkan beberapa di antara negara-negara ini memiliki beban yang secara ekonomi sangat berbahaya. Misalnya, rasio total utang luar negeri dengan GNP negara-negara seperti Sierra Leone, Guinea Bissau, Mali, Republik Yaman, Mauritania, Kamerun, Rep. Arab Syria, Jordan dan Gabon mencapai lebih dari 100%, termasuk Indonesia pada saat ini (lihat tabel 2).

Sementara itu rasio total utang luar negeri dengan ekspor barang dan jasa pada tahun 1980 rata-rata di atas 20% dan meningkat cukup drastis pada tahun 1995. DSR (*debt to service ratio*) beberapa negara jauh di atas 30%, misalnya Sierra Leone, Guinea Bissau, Pakistan, Indonesia dan Maroko.

### Wacana Pengembangan Sistem Moneter Islam

Bidang di mana karya teoritis maupun empiris tentang sistem ekonomi Islam yang telah diupayakan secara maksimum adalah bidang uang, perbankan dan kebijakan moneter. Ada dua persoalan moneter yang selama ini dianggap menjadi pemicu krisis-krisis yang dialami negara-negara sedang berkembang. *Pertama*, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dollar AS), tidak pada dirinya sendiri sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Apalagi bila kondisi kinerja fundamental ekonomi negara tersebut rapuh. *Kedua*,

kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tetapi juga dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari transaksi peminjaman atau penyimpanan uang (Yusanto, 2002).

Secara historis, sebenarnya uang kertas belum lama dikenal, tak lebih dari 300 tahun. Dalam lebih dari separuh umurnya itupun, uang kertas tidak pernah lepas dari jaminan secara riil berupa deposit uang logam. Baru setelah Perang Dunia I sistem standar emas berakhir digantikan dengan dolar AS. Dan baru setelah Perang Dunia II, persoalan moneter kemudian mengarah menjadi sebuah sistem global dengan dimulainya perjanjian

Bretton Woods, yang ditandai dengan lahirnya IMF dan Bank Dunia sejak tahun 1944. Sejak saat itu semua mata uang dunia berhubungan satu sama lain, yang dikaitkan dengan nilai dolar AS, yang nilainya secara *fixed* disetarakan dengan emas. Besarnya satu ons emas untuk setiap 35 dolar AS. Pada awal 1970-an, tepatnya ketika Richard Nixon tahun 1973 menghentikan sistem *fixed rate* dolar, maka kita mengenal sistem pasar bebas untuk uang. Jadi belum genap tiga puluh tahun, metamorfosis uang kertas, yang semula semata-mata sebagai alat tukar itu menjadi komoditas yang diperdagangkan mencapai puncaknya.

Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qodim Zalum dalam kitab *al amwal fi daulati al khilafah* mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (*al-wahdatu al-naqdiayatu al-asasiyah*) di mana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain (Muhammad, 2002). Apabila satuan dasarnya adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, maka dinamakan satuan uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*.

Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun tingkat kemurniannya antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur nilai masing-masing dan diketahui nilai tukarnya. Misalnya 1 dinar emas beratnya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak beratnya 2,975 gram perak. Sistem inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika

itu, kendati menggunakan sistem uang dua logam, memang tidak dicetak dinar dan dirham sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif dilakukan oleh umat Islam).

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, pada tahun 20 H atau tahun ke delapan pemerintahan beliau, dicetak uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar maupun tulisan Bahlawinya (huruf Persia) tetap ada, hanya ditambah dengan tulisan Arab gaya Kufi, seperti lafadz *bismillah* dan *bismillahi Robbi* yang terletak di tepi lingkaran. Demikian seterusnya, sistem ini diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifa Abdul Malik bin Marwan tahun 75 H (695 M), mencetak dirham khusus bercorak islam, dengan lafadz-lafadz islam yang ditulis dengan gaya Arab Kufi. Dengan demikian, dirham Persia tidak digunakan lagi. Dua tahun kemudian tepatnya tahun 77 H (697 M), Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak uang dinar khusus yang bercorak islam setelah meninggalkan pola dinar Romawi. Gambar-gambar dinar lama diubah dengan tulisan Islam, seperti *Allahu Ahad, Allah Baqa'*. Sejak saat itu orang Islam memiliki dinar dan dirham yang secara resmi digunakan sebagai mata uang.

Dengan cara ini, nilai nominal dan nilai instrinsik mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, sebarang misalinya dolar AS naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti nilai dolar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih dimungkinkan terjadi. Yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan (biasa disebut dengan inflasi emas). Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Tapi kondisi ini kecil kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya

memerlukan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang disamping memakan biaya investasi yang besar, juga memerlukan waktu yang lama. Tapi andaikan hal itu terjadi, emas temuan itu akan segera disimpan menjadi cadangan devisa negara, tidak langsung dilempar ke pasaran. Dengan cara demikian pengaruh penemuan emas terhadap penurunan nilai emas di pasaran bisa ditekan seminimal mungkin.

Di sinilah pentingnya ketentuan emas sebagai barang publik yang harus dikuasai negara.

Secara syar'i pemanfaatan sistem mata uang dua logam tersebut juga selaras dengan sejumlah perkara dalam Islam yang menyangkut uang. Di antaranya tentang nisab zakat harta senilai 20 dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta dalam bentuk emas dan perak (bukan termasuk menabung). Juga berkaitan dengan besarnya diya dalam perkara pembunuhan (sebesar 1000

dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Itu semua menunjukkan bahwa standar keuangan dalam sisten keuangan Islam adalah emas dan perak.

Berkaitan dengan masalah mata uang yang digunakan sebagai komoditas yang menimbulkan riba, hal ini bisa ditanggulangi bila terdapat kesepakatan dalam pelarangan riba. Dan lembaga keuangan yang paling sah dalam mengoperasikan transaksi keuangan hanyalah lembaga keuangan syariah.

Sepanjang sejarah, kaum muslimin telah mencapai konsensus (*ijma'*) di antara semua mazhab pemikiran Islam bahwa riba mencakup bunga (*interest*) dalam segala bentuknya. Tetapi, setelah penjajahan asing terhadap negeri-negeri muslim dan

terutama karena dominasi pasar keuangan oleh sistem barat yang mendasarkan pada bunga, kadangkadangkang terdapat para ulama yang berpendapat bahwa kondisi telah berubah dan perlu sebuah pemikiran ulang. Inti dari argumen tersebut adalah bahwa bunga yang diberikan dan diambil oleh lembaga-lembaga keuangan modern tidak sama sifatnya dengan bunga pada jaman jahiliyah, sehingga

diperlukan perubahan dalam menafsirkan riba.

Kontroversi tersebut tidaklah perlu dipertentangkan, karena secara substansial keduanya mengarah pada sistem penghapusan bunga, dan yang membedakan adalah pada masalah waktu serta strategi yang tepat. Pergeseran dari sistem yang ada ke suatu sistem Islam adalah tidak mungkin tanpa sejumlah reformasi sosial-ekonomi, hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menghapuskan bunga

Pergeseran dari sistem yang ada ke suatu sistem Islam adalah tidak mungkin tanpa sejumlah reformasi sosial-ekonomi, hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menghapuskan bunga tanpa melakukan penataan keuangan alternatif dan kelembagaan riil. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, apalagi bila ada kecenderungan bahwa sistem konvensional mengalami krisis

tanpa melakukan **penataan keuangan alternatif** dan **kelembagaan riil**. Hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, apalagi bila ada kecenderungan bahwa sistem konvensional mengalami krisis.

Chapra (2001) mengemukakan adanya pendekatan bertahap sambil menunggu kejatuhan sistem konvensional (barat) yang menghadapi krisis demi krisis. Pendekatan ini mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun dari buku klasik tentang pengembangan ekonomi. Chapra berhasil memformulasikan dalam bentuk siklus **kemajuan** dan siklus **kemunduran**. Lebih jauh dia berhasil merumuskan hubungan keterkaitan antara satu komponen pembangunan dengan komponen lainnya. Komponen-komponen tersebut antara lain

perlunya *pengembangan syari'ah* (S); *pengembangan masyarakat* (N); *peningkatan kekayaan* (W); *penegakan hukum dan governance* (j&g); serta *peran pemerintah* (G).

Dalam siklus kemajuan arahnya : S-N-W-j&g-G-S. Siklus ini dimulai dari tanamkan *kesadaran syari'ah* (S), kemudian kembangkan masyarakat sehingga tercipta *masyarakat* (N) yang paham syariah. Ini saja belum cukup. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan *kekayaan* (W) masyarakat yang paham syariah. Bila ini tercapai maka aspek pembangunan lainnya tidak dapat diabaikan dan yang terpenting adalah pembangunan *hukum dan keadilan* (j&g). Pada tahap ini kita memiliki masyarakat yang paham syariah yang kaya dan berkeadilan. Tahap selanjutnya adalah menegakkan *pemerintahan yang kuat* (G). Namanya saja siklus, artinya proses darimana memulainya dapat melalui komponen manapun, asalkan menyadari konsekuensi logis tahapannya.

Dalam **siklus kemunduran** arahnya: j&g-W-N-S-G-j&g. Kondisi ini dapat diandaikan dalam suatu masyarakat yang mengalami keadaan *anarkis* dan *chaos*, dimana hukum tidak ditegakkan dan pembangunan tidak berorientasi pada keadilan (j&g). *kekayaan* yang telah terakumulasi sirna (W) terjarah oleh tindakan anarkisme, lapangan kerja dan kegiatan masyarakat menyusut (N), syari'ah terasa seperti utopia (S), dan akhirnya melemahnya pemerintahan (G). Dengan strategi yang tepat siklus kemunduran ini dapat dibalik menjadi siklus kemajuan. Misalnya, menyusutnya kegiatan masyarakat dan lapangan kerja menjadi titik balik

kesadaran masyarakat untuk kembali ke syari'ah, dan seterusnya sehingga menjadi siklus kemajuan.

### Langkah-Langkah Konkrit

Secara empirik, upaya-upaya negara-negara muslim dapat dilihat dari pengembangan lembaga keuangan yang islami di negara masing-masing maupun kerjasama antara negara. Eksperimen pertama perbankan islam di jaman modern dilakukan pertama kali dalam bentuk bank tabungan pedesaan di *Mit-Ghamr* di delta sungai Nil- Mesir tahun 1963-67. Eksperimen ini yang secara umum dianggap telah berhasil, berakhir karena alasan-alasan politis. Orang yang berhak mendapatkan pengakuan atas rintisan ini adalah *Ahmad bin Najjar*. Eksperimen lain dilakukan di Karachi, Pakistan oleh *SA Irshad* yang mendirikan bank koperasi pada bulan Juni 1965, tetapi bank ini tidak berhasil karena salah urus dan kurangnya pengawasan birokrasi, yang akhirnya harus ditutup (Chapra, 2001).

Kedua eksperimen tersebut berfungsi mengatasi hambatan psikologis terhadap keuangan islami dan menjadi inspirasi pendirian bank-bank islam setelah pertengahan 70-an. Bank islam pertama yang sudah matang adalah Bank Islam Dubai yang didirikan pada bulan Maret 1975. Ini dengan cepat diikuti oleh bank-bank lainnya. Menjelang akhir tahun 1996, lebih dari 166 lembaga-lembaga keuangan telah didirikan melalui inisiatif masyarakat maupun swasta, yang tersebar di 34 negara muslim maupun non-muslim. Dalam perkembangannya, bank-bank tersebut dianggap berhasil dengan melihat indikasi berupa jaringan

Popularitas perbankan Islam terus berkembang dan jumlah deposan nampaknya semakin meningkat. Meskipun pada tahun 50-an dan 60-an, perbankan Islam hanya merupakan impian akademis, yang mungkin hanya disadari oleh segelintir orang, sekarang hampir dipastikan seluruh negara muslim telah mempunyai bank tersebut. Saat ini perbankan islam telah menjadi bahasan yang cukup populer. Beberapa bank sentral telah mengakui eksistensinya bahkan dimasukkan sebagai salah satu pasal dalam perundang-undangannya.

Kondisi terkini perkembangan bank syaria'ah di beberapa negara yang masih menganut dual banking system. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa tingkat penetrasi bank syaria'ah dalam ukuran total asset bank syaria'ah terhadap total asset perbankan masih relatif rendah, kecuali di Kuwait yang telah mencapai 30% pada tahun 2000. Sedangkan penetrasi perbankan syaria'ah di beberapa negara masih di bawah 20%, yaitu Saudi Arabia 12%, UAE 6%, Malaysia 6,8% dan Bahrain 1,3 % pada tahun yang sama. Sedangkan penetrasi perbankan syaria'ah di Indonesia paling rendah, yaitu di bawah 1 %, hanya sekitar 0,2 %

cabang, neraca dan perolehan laba. Mereka menikmati modal sebesar \$ 7,3 milyar dan cadangan \$ 5,7 milyar pada tahun 1996. Asset dan deposito mereka berjumlah masing-masing \$137 milyar dan \$ 101,2 milyar. Bank-bank tersebut mendapat keuntungan bersih \$1,7 milyar pada tahun itu. Rasio keuntungan terhadap asset dan modal masing-masing 1,2% dan 23,1%. Semua rasio ini lebih tinggi dari yang umumnya berlaku di dunia perbankan, yang menjadi bukti kesehatan dan kinerja yang baik dari lembaga-lembaga ini.

Popularitas perbankan Islam terus berkembang dan jumlah deposan nampaknya semakin meningkat. Meskipun pada tahun 50-an dan 60-an, perbankan Islam hanya merupakan impian akademis, yang mungkin hanya disadari oleh segelintir orang, sekarang hampir dipastikan seluruh negara muslim telah mempunyai bank tersebut. Saat ini perbankan Islam telah menjadi bahasan yang cukup populer. Beberapa bank sentral telah mengakui eksistensinya bahkan dimasukkan sebagai salah satu pasal dalam perundang-undangannya.

Di Indonesia, keberadaan bank syaria'ah secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1991 dengan berdirinya bank syaria'ah pertama di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya BMI ini, belum terlalu diperkuat dengan aturan perbankan yang menjelaskan secara tegas prinsip-prinsip syaria'ah bagi perbankan. Undang-undang yang ada, yaitu UU. No. 7 tahun 1992 hanya menguraikan secara selintas tentang "bank dengan sistem bagi hasil". Sejak diberlakukannya undang-undang no. 10

1998, maka ketentuan dengan perbankan syaria'ah telah diatur secara tegas. Dengan adanya *dual banking system* yang ada dalam Undang-undang tersebut, juga telah membuka peluang bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syaria'ah, seperti Bank IFI, Bank BNI, dan bank Jabar. Sedangkan bank konvensional yang telah mengkonversi diri menjadi bank syaria'ah adalah Bank Susila Bhakti menjadi Bank Syaria'ah Mandiri (Khoirunnissa, 2002)

Kondisi terkini perkembangan bank syaria'ah di beberapa negara yang masih menganut *dual banking system*. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa tingkat penetrasi bank syaria'ah dalam ukuran total asset bank syaria'ah terhadap total asset perbankan masih relatif rendah, kecuali di Kuwait yang telah mencapai 30% pada tahun 2000. Sedangkan penetrasi perbankan syaria'ah di beberapa negara masih di bawah 20%, yaitu Saudi Arabia 12%, UAE 6%, Malaysia 6,8% dan Bahrain 1,3 % pada tahun yang sama. Sedangkan penetrasi perbankan syaria'ah di Indonesia paling rendah, yaitu dibawah 1 %, hanya sekitar 0,2 %.

Perkembangan terakhir perbankan syaria'ah internasional semakin marak dengan adanya beberapa negara (seperti Malaysia, Bahrain, Brunei dan Indonesia beserta IDB) yang telah membentuk *International Islamic Financial Market (IIFM)*. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan bank-bank yang memiliki kelebihan likuiditas dapat menempatkan dananya pada pasar di bawah payung IIFM. Adanya pasar tersebut akan dapat mengurangi persoalan rendahnya efisiensi

pengelolaan dana bank syaria'ah yang terjadi selama ini. Dalam kerangka IIFM, seberapa jauh bank-bank syaria'ah dapat mengakses pasar tersebut akan sangat tergantung pada kinerja bank-bank syaria'ah yang dijadikan dasar bagi otoritas moneter di tiap negara untuk merekomendasikan kepada komite IIFM, agar bank tersebut dapat menjadi anggota.

Perkembangan perbankan syaria'ah, diikuti pula oleh berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syaria'ah non-bank (LKS) seperti asuransi syaria'ah, modal ventura, BMT dan reksa dana, yang telah mencapai 166 LKS yang tersebar di 34 negara dengan total asset \$137,7 milyar dan modal \$7,3 milyar pada tahun 1997. Sehingga diperlukan *prudential regulation* bagi lembaga-lembaga tersebut. Sehubungan dengan hal itu, 18 negara yang memiliki LKS telah berinisiatif mendirikan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* yang mendapat dukungan dan koordinasi penuh dari IMF. Kehadiran lembaga ini sangat dinantikan karena adanya ketentuan-ketentuan yang berstandar internasional akan menjadi acuan dalam menetapkan *prudential regulation* bagi bank syaria'ah. Kemampuan bank-bank syaria'ah dalam memenuhi ketentuan ini akan memperkokoh bank-bank tersebut dalam berperan aktif di kancah sistem moneter global melalui IIFM.

Meskipun demikian, gerakan ini masih merupakan tahap awal dan memerlukan waktu yang panjang untuk menjadikannya sebagai sebuah lembaga yang matang. Eksistensi lembaga-lembaga keuangan bank maupun non-bank ini akan semakin nampak bila sistem perbankan konvensional dihadapkan pada krisis kepercayaan terus-menerus. Disamping itu kesadaran masyarakat terhadap bahayanya sistem bunga akan mempercepat kematangan lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, IIIT Indonesia, 2001
- Afdawaiza, *Isu-Isu Kontemporer di Sekitar Perbankan Islam (Antisipasi untuk Pengembangan ke Depan)*, Makalah Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, UII, 2002
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala*, Penerbit Erlangga, 1995
- Chapra, Umer M, 2001, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh SEBI, Jakarta 2001.
- Hendri Anto, Muhammad B, *Optimalisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Muslim dan Urgensi Pembentukan "Islamic Common Market"*, makalah Simposium Nasional I sistem ekonomi Islam, UII, 2002.
- Islamic Development Bank, 2001, Annual Report 1999-2000, Jeddah, IDB.
- Ismail, Ysanto Muhammad, *Menyoroti Kebijakan Perbankan Syaria'ah dalam Kontek Mencari Solusi Alternatif Fundamental Krisis Moneter*, makalah Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, UII, 2002
- Khoirunnissa, Delta, *Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syaria'ah (Studi Kasus di Indonesia)*, Makalah Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, UII, 2002
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba empat, 2002
- Misanan, Munrokhim, *Pilihan Mata Uang, Stabilitas Perekonomian dan Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Islam*, Makalah Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, UII, 2002.
- Siregar, Mulya, *Agenda Perbankan Syaria'ah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang Tangguh di Indonesia*, Makalah Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, UII, 2002
- World Bank, 1999, World Development Report 1998, New York, World Bank.